

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKjIP)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS SOSIAL
2023**

KATA PENGANTAR

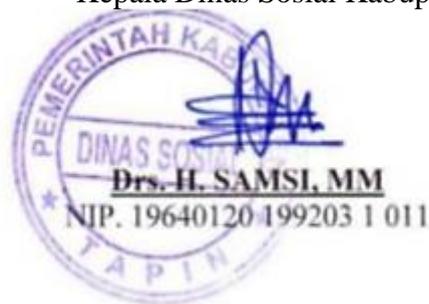
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2022 ini dengan baik.

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022 memuat pertanggungjawaban kinerja Tahun 2022. Di dalamnya termuat Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin. Termuat juga Rencana Kinerja, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan jajaran Dinas Sosial serta capaian kinerja yang tercermin dalam Realisasi fisik dan keuangan selama Tahun 2022.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Dinas Sosial dan pihak lainnya yang telah terlibat dalam penyusunan LKjIP Dinas Sosial Tahun 2022. Laporan yang kami buat ini memang masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik yang membangun amat diharapkan untuk kesempurnaannya di waktu mendatang.

Akhirnya, kami berharap agar laporan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

Rantau, Februari 2023
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin bahwa Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2022 ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2022 yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial dengan Bupati Tapin.

Terdapat 2 (dua) kinerja utama dan 2 (dua) indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018-2023 serta Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor: 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

Dinas Sosial Kabupaten Tapin dalam masa aktifnya telah menetapkan Rencana Strategis Perubahan untuk periode 2018-2023. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Strategis periode 2018-2023 yang telah disusun dalam masa aktif Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang merujuk pada bidang Sosial adalah sebagai berikut:

- ❖ Tujuan : - Menurunnya Kemiskinan
- ❖ Sasaran : - Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan
- Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- ❖ Indikator sasaran : - Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri

- Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rata-rata pencapaian indikator kinerja tersebut secara keseluruhan mencapai 81,40 % atau masuk dalam kategori Baik. Adapun, 1 (satu) indikator kinerja utama yang ditetapkan masuk ke dalam kriteria Baik (B) karena memiliki nilai kinerja 100 persen, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja utama yang ditetapkan masuk ke dalam kriteria Cukup (C) karena memiliki nilai kinerja 62,80%. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	%	2,5	1,57	62,8
2.	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100
Rata-rata capaian IKU						81,4

Pencapaian target indikator kinerja utama tersebut didukung dengan melaksanakan 6 program dengan 13 kegiatan dan 50 Sub-kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.678.585.487,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 15.444.210.758,00 atau 78,48%. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai realisasi anggaran sebesar 100% yang disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan. Namun kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapin pada umumnya dan Dinas Sosial pada khususnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG	3
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN.....	4
1. Tugas Pokok	6
2. Fungsi	6
C. DUKUNGAN SUMBER DAYA	10
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	15
E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	16
F. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021	17
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	19
A. PERENCANAAN STRATEGIS	20
B. INDIKATOR UTAMA KEGIATAN	22
C. PERJANIAN KINERJA	25
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	36
B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA	38
BAB IV	93
PENUTUP	94
1. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA	95
2. SARAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022 berdasarkan Pangkat/Golongan.....	11
Tabel 1.2	Komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapin berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2022	11
Tabel 1.3	Pegawai Tidak Tetap di Dinas Sosial Tahun 2022	12
Tabel 1.4	PSKS Dinas Sosial Berdasarkan Kelompok Tahun 2022	12
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022	13
Tabel 3.1	Hasil pengukuran dan pencapaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Sosial Tahun 2022	39
Tabel 3.2	Hasil pengukuran dan pencapaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Sosial Tahun 2022	40
Tabel 3.3	Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2022	41
Tabel 3.4	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1	43
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1	43
Tabel 3.6	Data Jumlah PPKS yang mendapat Bantuan KUBE dan UEP, Serta Bimbingan Fisik bagi Disabilitas Tahun 2022	44
Tabel 3.7	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2	46
Tabel 3.8	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2	46
Tabel 3.9	Data Jumlah PSKS terampil yang berpartisipasi dalam melayani PPKS Tahun 2021	47
Tabel 3.10	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022	83
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Tahun 2022	84

LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP) PADA DINAS SOSIAL
- LAMPIRAN 2 : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021
- LAMPIRAN 3 : MONEV RENCANA AKSI (ESELON II,III DAN IV SERTA JF)
- LAMPIRAN 4 : MONEV IKI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang sasarannya diarahkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaik-baiknya serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya dalam upaya menciptakan suatu kondisi tata kehidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya secara layak bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi : Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunasosialan, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan situasi dan kondisi politik di Indonesia, serta perkembangan masyarakat secara global dan pembangunan yang kurang optimal, berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya bahkan mengarah kepada masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tapin juga dituntut untuk menyelenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dengan menerapkan azas akuntabilitas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun rencana Kerja Tahunan yang dibuat sebelumnya.

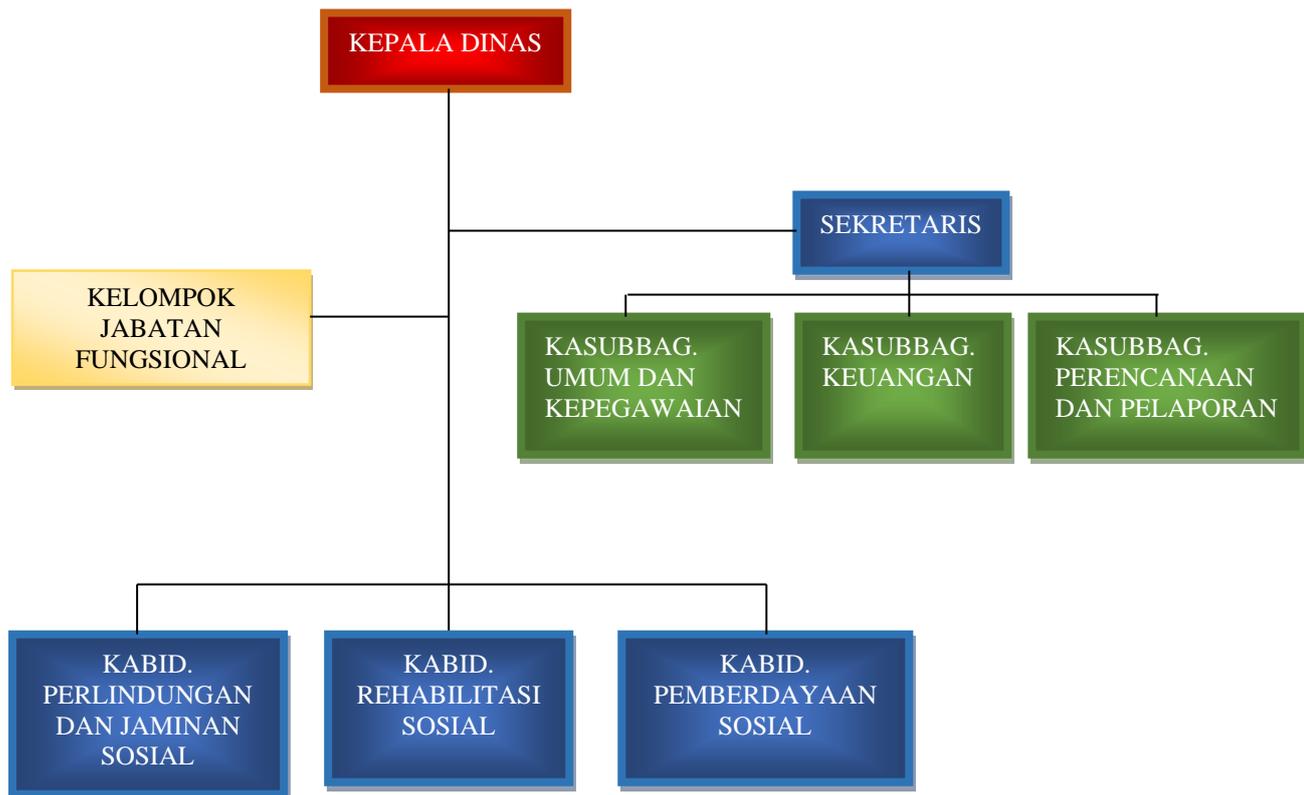
LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

Dinas Sosial Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa untuk Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin .

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2022 :



1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Tapin ialah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

2. Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Tapin mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- 4) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- 5) pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
- 6) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di daerah;
- 7) penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di daerah;
- 8) pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- 9) pengelolaan kesekretariatan; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tapin terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat Dinas Sosial :

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub bagian perencanaan dan pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- b) Sub bagian keuangan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- c) Sub bagian umum, kepegawaian
mempunyai tugas mengelola surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian

3. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Memiliki Uraian Tugas :

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial keluarga dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial, korban bencana, dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan sosial dan korban bencana;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis jaminan sosial keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan sosial, korban bencana, dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, Memiliki Uraian Tugas :

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis rehabilitasi anak, lanjut usia, rehabilitasi disabilitas dan keluarga;
- b. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- c. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- d. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

- e. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- f. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial; dan
- i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- j. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan rehabilitasi disabilitas dan keluarga.
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial, Memiliki Uraian Tugas :

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan panti sosial, kepahlawanan, pemberdayaan sosial dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perumusan kebijakan teknis pembinaan panti sosial, kepahlawanan, pemberdayaan sosial dan kelembagaan.
- b. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- c. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan Sosial komunitas adat terpencil;
- d. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan Sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi Sosial;

- e. penyusunan program, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan sumber dana bantuan Sosial;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan Sosial
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
 - h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan Pembinaan Panti Sosial dan keahlawanan.
 - i. mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial.
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. DUKUNGAN SUMBER DAYA

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, Sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kinerja sumber daya manusia merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukkan jumlah energi (fisik atau mental) yang digunakan oleh individu untuk menjalankan suatu tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Tapin di dukung oleh Pegawai yang terdiri dari ASN, Non ASN dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022 berdasarkan
Pangkat/Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV/C	1
2.	IV/A	4
3.	III/D	5
4.	III/C	2
5.	III/B	1
6.	III/A	3
7.	II/D	1
8.	II/B	1
9.	I/B	1
	TOTAL	19 Orang

Sedangkan rekapitulasi ASN di Dinas Sosial berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal, sebagaimana rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapin
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah PNS Menurut Pendidikan Formal															
		SD		SLTP		SLTA		D. III		D.IV		S.I		S.2		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pejabat Struktural					1		1				1	2	2	1	5	3
2	Staf Pelaksana	1		1		1						1	2			4	2
3	Jabatan Fungsional					1						3	1			4	1
J U M L A H		1		1		3		1				6	6	2	1	13	6
T o t a l		PNS DINAS SOSIAL														19 orang	

Untuk kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial juga didukung oleh Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 12 orang dengan rincian tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai Tidak Tetap di Dinas Sosial Tahun 2022

No.	Personil	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat	
	Tenaga Administrasi	2
	Tenaga Kebersihan	1
	Tenaga Keamanan	1
2	Bidang Rehabilitasi Sosial	
	Tenaga Administrasi	2
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Tenaga Administrasi	3
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	
	Tenaga Administrasi	3
	JUMLAH PTT	12

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, terdapat 4 jenis SDM Kesejahteraan sosial yaitu tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial dan penyuluh sosial. Untuk pekerja sosial dan penyuluh sosial terdapat unsur ASN dan non-ASN, sedangkan relawan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial terdiri dari unsur masyarakat (non-ASN) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4
PSKS Dinas Sosial Berdasarkan Kelompok Tahun 2022

No	SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial	
	- Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan	26
2	Pekerja Sosial Profesional	3
3	Relawan Sosial	
	Perorangan :	
	- TKSK	12
	- PSM	35
	- TAGANA	33
	Kelembagaan :	

No	SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah
	- KARANG TARUNA	142
	- Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	26
	- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1
	- Lembaga Kesejahteraan Sosial	7
	- SLRT	1
4	Penyuluh Sosial	7

Sumber Data : Bidang Pemberdayaan Sosial

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor adalah hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor guna mencapai tujuan suatu organisasi. Dimana sarana merupakan fasilitas yang dapat dilihat serta di gunakan oleh karyawan dalam menyelesaikan tugas kantor. Contohnya; gedung, ruangan kantor, peralatan, mesin kantor. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang tidak berwujud, namun menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Untuk itu, guna mencapai tujuan organisasi, suatu kantor harus dapat menjamin dan menyediakan fasilitas yang menunjang keberhasilan karyawannya dalam bekerja. Karena jika suatu kantor hanya mengandalkan tenaga karyawannya saja tanpa di dukung dengan fasilitas yang memadai, tentu karyawan akan bekerja dengan kurang maksimal dan segala aktivitas kantor tidak dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, tujuan dari organisasi itu sendiri tidak tercapai. Dukungan sarana dan prasarana yang ada pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapin bisa dilihat pada Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5 :
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Tapin
Tahun 2022

No	Aset Dinas Sosial	Jumlah	Satuan
1	- Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	256	m ²
2	- Tanah Bangunan Rumah Penjaga	181,5	m ²
3	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	417	m ²
4	- Tanah Untuk Makam Pahlawan	10.439	m ²
5	- Transportable Electric Generating Set	1	buah
6	- Pompa Lain-lain	1	buah
7	- P.C Unit	23	buah
8	- Lap Top	10	buah
9	- Note Book	1	buah
10	- Personal Komputer lainnya	1	buah
11	- Komputer Unit Lainnya	2	buah

No	Aset Dinas Sosial	Jumlah	Satuan
12	- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	1	buah
13	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	buah
14	- Monitor	1	buah
15	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	buah
16	- Peralatan Personal Komputer lainnya	2	buah
17	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	unit
18	- Pick Up	1	buah
19	- Sepeda Motor	1	buah
20	- kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	buah
21	- Speed Boat / Motor Tempel	1	buah
22	- Mesin Gergaji	2	buah
23	- perkakas bengkel service lainnya (dst)	2	buah
24	- Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	buah
25	- Lemari Kayu	10	buah
26	- Rak Kayu	7	buah
27	- Filing Cabinet Besi	6	buah
28	- Lemari Kaca	2	buah
29	- Lemari Makan	1	buah
30	- CCTV - Camera Control Television System	2	buah
31	- White Board	1	buah
32	- Alat Kantor Lainnya	1	buah
33	- Meja Kerja Kayu	5	buah
34	- Kursi Kayu	2	buah
35	- Meja Rapat	2	buah
36	- Meja 1/2 Biro	15	buah
37	- Meja Makan Kayu	4	buah
38	- Kursi Tamu	2	buah
39	- Kursi Putar	1	buah
40	- Kursi Biasa	3	buah
41	- Kursi Lipat	48	buah
42	- Meja Komputer	2	buah
43	- Sofa	7	buah
44	- Meubeleur lainnya	19	buah
45	- Mesin Pemotong Rumput	1	buah
46	- Lemari Es	4	buah
47	- A.C. Window	1	buah
48	- A.C. Split	22	buah
49	- Kipas Angin	3	buah
50	- Alat Dapur lainnya	2	buah
51	- Televisi	6	buah
52	- Loudspeaker	10	buah
53	- Tangga Aluminium	1	buah
54	- Dispenser	3	buah
55	- Handy Cam	1	buah

No	Aset Dinas Sosial	Jumlah	Satuan
56	- Karpas	1	buah
57	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	37	buah
58	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	buah
59	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	buah
60	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	buah
61	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	buah
62	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	buah
63	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	buah
64	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	buah
65	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	buah
66	- Lemari Arsip Pejabat lainnya	7	buah
67	- Audio Mixing Console	1	buah
68	- Microphone/Wireless MIC	16	buah
69	- Power Amplifier	1	buah
70	- peralatan studio audio lainnya (dst)	2	buah
71	- Camera Digital	1	buah
72	- Camera Conference	2	buah
73	- Handy Talky (HT)	6	buah
74	- alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	2	buah
75	- Personal Computer	1	buah
76	- Wireless Data Transmission System	1	buah
77	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	48.00	m ²
78	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	175.00	m ²
79	- Bangunan Gudang Tertutup Permanen	80.00	m ²
80	- Gedung Pos Jaga Permanen	93.00	m ²
81	- Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	36.00	m ²
82	- Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	72.00	m ²
83	- Buku ekonomi	2	buah
84	- Buku hukum	3	buah

Sumber: Buku Inventaris Gabungan Dinas Sosial Kab. Tapin, 2022

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapin untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi bantuan sosial dan modal usaha serta pemuktahiran data penerima bantuan
2. Peningkatan kapasitas SDM PPKS, pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis

3. Peningkatan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan peran aktifnya
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

E. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, selain dihadapkan kepada tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga memiliki berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain :

- a. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- b. Ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi Perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung.
- c. Ketidakmampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya
- d. Minimnya bantuan sosial dan pembinaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- e. Minimnya sarana dan prasarana tempat latihan keterampilan bagi Anak Terlantar di Kabupaten .
- f. Belum optimalnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- h. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
- i. Terbatasnya ketersediaan anggaran dana dalam mendukung program dan kegiatan.
- j. Belum adanya rumah singgah sementara bagi PPKS terlantar
- k. Terbatasnya ketersediaan anggaran dana dalam mendukung program dan kegiatan.

F. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Pada tahun 2021, SAKIP Dinas Sosial Kabupaten Tapin tidak dilakukan evaluasi oleh aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan pembangunan pada organisasi sektor publik bermula dari disusunnya rencana strategis (RENSTRA) pada masing-masing organisasi sektor publik. RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tapin diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Tapin 2018-2023, serta menggambarkan Tujuan dan Sasaran organisasi, serta cara pencapaiannya dalam bentuk Kebijakan dan Program. Rincian lebih lanjut dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1. Visi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD adalah visi bupati dan wakil bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang akan dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Adapun makna yang terkandung dalam visi Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bersama, memiliki makna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
- b. Mewujudkan, memiliki makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
- c. Maju, memiliki makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
- d. Sejahtera, memiliki makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.
- e. Agamis, memiliki makna pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

2. Misi Kepala Daerah

Misi merupakan suatu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam kerangka kajian teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Adapun misi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
- b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
- c) Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
- d) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e) Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Tapin tahun 2018-2023 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendukung perwujudan misi kedua. Dalam rangka mewujudkan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa, maka Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah dapat membantu masyarakat dalam hal pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin, serta pelatihan dan bimbingan teknis dan bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga mereka dapat mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Sosial yang adalah sebagai berikut :

3.1 Tujuan :

Menurunnya kemiskinan

3.2 Sasaran :

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan.
- b. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

B. INDIKATOR UTAMA KEGIATAN

Pada saat proses penyusunan LKjIP Tahun 2022, ada kebijakan dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapin dan prosesnya diawali dengan Perumusan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang baru yang lebih baik dan akuntabel. Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri.
2	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	<p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)</p> <p><u>Makna indikator :</u> Mengindikasikan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri. Definisi operasional yg mengindikasikan PPKS yang dientaskan yaitu memperbaiki,meningkatkan keadaannya menjadi lebih baik dibanding sebelumnya</p> <p><u>Kriteria Mandiri :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa mengakses pekerjaan atau memiliki usaha sendiri 2. Tidak bergantung pada bantuan 3. Mampu memberikan nilai ekonomi 4. Dapat mengaplikasikan hasil pelatihan keterampilan berusaha yang diberikan pada kehidupan sehari-hari 5. Dari keterampilannya tersebut mampu menghasilkan/berpenghasilan <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Persentase PPKS yang Mandiri merupakan indikator yang jelas digunakan untuk menghitung besaran PPKS yang sudah mandiri, karena dengan kemandirian PPKS akan mengentaskan jumlah PPKS tersebut.</p>	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung jawab	Sumber Data
			<p><u>Rumus :</u></p> $\frac{\text{Jumlah PPKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS keseluruhan}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<p>Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p><u>Makna indikator :</u> Mengindikasikan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil</p> <p><u>Kriteria Terampil :</u> Cakap dalam menyelesaikan tugas Kesejahteraan Sosial, mampu dan cekatan dalam melayani PPKS</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah partisipasi SDM PSKS yang terampil}}{\text{Jumlah SDM PSKS yang terampil}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

C. PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 untuk Eselon II, III, IV, Jabatan Fungsional, adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS (ESS.II)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri.	2,50 %	1,57 %
2.	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS (ESS.III)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %
2.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %
4.	Meningkatkan pelayanan kualitas administrasi keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (ESS.IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase Aset Yang Tercatat dengan baik	100 %	100 %
		Persentase Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat yang baik	100 %	100 %
2.	Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi Serta Administrasi Kepegawaian SOPD	Persentase Dokumen Sarana Dan Prasarana yang baik	100 %	100 %
		Persentase Pegawai Yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani Secara Tertib	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN (ESS.IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SOPD sesuai standar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai standar	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN KEUANGAN (ESS.IV)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Dokumen administrasi keuangan SOPD yang akuntabel	Persentase dokumen laporan keuangan yang akuntabel	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL (ESS. III)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gepeng) yang mendapatkan Bantuan Sosial	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gepeng) yang mendapatkan Bantuan Sosial	77%	74,35%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	PPKS Terlantar (Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan, Pengemis) mendapatkan distribusi Bantuan Sosial	Persentase PPKS Terlantar (Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan, Pengemis) mendapatkan distribusi Bantuan Sosial	96%	92,88%
2.	PPKS Lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase PPKS Lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	10%	4,11%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar) mendapatkan distribusi Bantuan Sosial	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar) yang mendapatkan Distribusi Bantuan Sosial	36%	32,43%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (ESS. III)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya aksesibilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap permodalan	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan	2,5%	1,01 %
2.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir	100%	80%
4.	Meningkatnya Kualitas Rumah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Rumah Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang layak huni	1,92%	1,48%
5.	Meningkatnya Penanganan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100%	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	1,92%	1,48%
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhannya	100%	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
JF. PEKERJA SOSIAL DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Fakir Miskin yang layak mendapatkan bantuan EUP/KUBE	Persentase Fakir Miskin yang lulus seleksi fasilitasi bantuan UEP/KUBE	2,5%	1,01%
2.	Bantuan Sosial tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan data	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang mendapatkan bantuan Sosial BPNT tepat sasaran sesuai dengan data	100%	100 %
		Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang mendapatkan bantuan Sosial PKH tepat sasaran sesuai dengan data	100%	100%
3.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	Persentase Data Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	100%	80%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL (ESS. III)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terampil	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) PSKS yang terampil	100 %	100 %
2.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana TMP	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentasi Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina	45,56 %	28,37%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
JF. PENYULUH SOSIAL DI BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisian, dan kejuangan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dalam Kondisi Baik	100 %	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Tapin tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Perencanaan yang sudah ditetapkan kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada berakhirnya masa tahun anggaran, perencanaan dan perjanjian kinerja ini harus diukur dan dilaporkan kepada publik.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin merupakan merupakan Laporan Kinerja Tahun Keempat dari Renstra dan RPJMD periode 2018-2023. Tetapi pada tahun keempat ini, RENSTRA Dinas Sosial dilakukan perubahan sebagai tindak lanjut hasil asistensi untuk perbaikan IKU pada Dinas Sosial.

LKjIP 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
II	Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
III	55 % sampai 75 %	Cukup (C)
IV	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA

1. Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin

Untuk mewujudkan pencapaian visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada periode 2018-2023, Visi Pembangunan Kabupaten Tapin adalah:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tapin sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.

2. Misi Kedua

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

3. Misi Ketiga

Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Misi Kelima

Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Dinas Sosial Kabupaten Tapin berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapin termasuk pada “Misi Kedua” yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning), dalam konteks ini tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diharapkan akan diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sebagai “dampak” tujuan dan sasaran, memberi petunjuk tentang hasil pembangunan daerah yang diharapkan akan diperoleh dari pencapaian outcome, sebagai sesuatu yang menggambarkan kondisi apa yang ingin diubah dari serangkaian ikhtiar (program) pembangunan yang dijalankan. Dalam konteks ini, tujuan dan sasaran menjelaskan apa yang ingin diubah dari kondisi masa kini yang kurang ideal sebagaimana tercermin dari isu-isu dan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

Berdasarkan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin periode 2018-2023, Dinas Sosial Kabupaten Tapin memiliki 3 (tiga) Indikator Sasaran, realisasi Indikator Sasaran I pada tahun ke empat RPJMD yaitu Tahun 2022 sebesar 3,60% dari target 3,45% dengan capaian 95,65%, realisasi Indikator Sasaran II sebesar 0,45 dari target 0,33 dengan capaian 126,67%, realisasi Indikator Sasaran III sebesar 0,04 dari target 0,07 dengan capaian 25% (Tabel 3.1). Dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin Dinas Sosial terhadap Indikator Sasaran RPJMD dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- Sebanyak 1 indikator berkategori “**BAIK SEKALI (BS)**”.
- Sebanyak 1 indikator berkategori “**BAIK (B)**”.
- Sebanyak 1 indikator berkategori “**KURANG (C)**”.

Tabel 3.1

Hasil pengukuran dan pencapaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Sosial Tahun 2022

SASARAN		Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Capaian %
URAIAN	INDIKATOR			
Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3,45	3,60	95,65
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	0,45	0,33	126,67
	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	0,04	0,07	25

(Sumber Data BPS Tapin 17 Januari 2023)

Pada Tabel 3.1 terlihat realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Sosial Tahun 2022, yaitu Persentase penduduk miskin (%) sebesar 3,60% menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada RPJMD Kab. Tapin yaitu sebesar 3,45% telah tercapai 95,65%. Realisasi Sasaran Indikator II Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin) sebesar 0,33 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada RPJMD Kab. Tapin yaitu sebesar 0,45 dengan capaian 126,67%. Realisasi Sasaran Indikator III Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin) sebesar 0,07 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada RPJMD Kab. Tapin yaitu 0,04 dengan capaian 25 %.

Tabel 3.2

Hasil pengukuran dan pencapaian Indikator Sasaran RPJMD pada Dinas Sosial Tahun 2022

SASARAN		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahunan 2022
URAIAN	INDIKATOR		
Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3,60	3,60
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	0,28	0,33
	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	0,04	0,07

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial Kabupaten Tapin telah melakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran dan pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	%	2,5	1,57	62,8
2.	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100
Rata-rata capaian IKU						81,4

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin sebesar 81,4% hal ini mencerminkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tapin telah “**Baik (B)**” dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan target kinerja sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2022.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial tahun 2022, terdapat 2(dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- **Sebanyak 1 indikator berkategori “BAIK (B)”.**
- **Sebanyak 1 indikator berkategori “CUKUP (C)”.**

Indikator berkategori **BAIK** yaitu Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan capaian sebesar 100%. Dan Indikator berkategori **CUKUP** yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri dengan capaian 62,80%.

3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Tercapainya Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri dan Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil, disebabkan karena adanya bantuan permodalan berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas dan fakir miskin yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kab. Tapin serta pemberian bimbingan fisik bagi Disabilitas yang diharapkan dengan bantuan tersebut dapat membuat mereka mandiri, tidak bergantung pada bantuan, mampu memberikan nilai ekonomi, dapat mengaplikasikan hasil pelatihan keterampilan berusaha yang diberikan pada kehidupan sehari-hari sehingga dari keterampilannya tersebut mampu menghasilkan/berpenghasilan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

Adapun capaian IKU Dinas Sosial Tahun 2022 dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1

Sasaran :

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terentaskan

Pencapaian strategis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terentaskan diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri. Perhitungan Indikator Kinerja ini didapat dari Jumlah PPKS yang Mandiri dibagi Jumlah PPKS keseluruhan dikali 100%.

Pada tahun 2022 fakir miskin yang mendapat bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berjumlah 18 orang, serta bantuan berupa pelatihan keterampilan bagi disabilitas terlantar berupa pelatihan merias wajah. Untuk PPKS keseluruhan dengan sumber data DTKS BNBA jumlah Fakir miskin 1.784 rumah tangga.

Sehingga realisasi capaian kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri adalah 62,80% dengan realisasi 1,57 % dari target 2,5%, seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS keseluruhan}} \times 100 \%$	$(28 \div 1.784) \times 100\% = 1,57\%$

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri	2,5%	1,57%	62,80%

Tabel 3.6
Data Jumlah PPKS yang mendapat Bantuan KUBE dan UEP, Serta Bimbingan Fisik bagi Disabilitas Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah	Sumber Dana
1.	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Penyandang Disabilitas		
	a. Uang Pembinaan	10	APBD KAB.
2.	Bantuan Bimbingan Fisik untuk Penyandang Disabilitas		
	a. Rias Wajah	10	APBD KAB.
3.	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin		
	a. Jualan Es	3	APBD PROVINSI
4.	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin		
	a. Keramba Ikan Tawar	5	APBD PROVINSI
	Total	28	

Fakir miskin yang telah dibantu melalui KUBE dan UEP serta pemberian bimbingan fisik bagi Disabilitas yang diharapkan dengan bantuan tersebut dapat membuat mereka mandiri, tidak bergantung pada bantuan, mampu memberikan nilai ekonomi, dapat mengaplikasikan hasil pelatihan keterampilan berusaha yang diberikan pada kehidupan sehari-hari sehingga dari keterampilannya tersebut mampu menghasilkan/berpenghasilan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

2

Sasaran :**Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Pencapaian strategis Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) diukur oleh indikator kinerja berupa Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS). Perhitungan Indikator Kinerja ini didapat dari Jumlah partisipasi SDM PSKS yang terampil dibagi Jumlah SDM PSKS yang terampil dikali 100%.

Pada tahun 2022 PSKS terampil yang berpartisipasi dalam melayani PPKS berjumlah 185 orang, sedangkan jumlah PSKS yang terampil sebanyak 185 orang.

Sehingga realisasi capaian kinerja Persentase PSKS dalam melayani PMKS adalah 100% dengan realisasi 100% dari target 100%, seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	$\frac{\text{Jumlah partisipasi SDM PSKS yang terampil}}{\text{Jumlah SDM PSKS yang terampil}} \times 100 \%$	$\frac{185}{185} \times 100 \% = 100\%$

Tabel 3.8
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.9
Data Jumlah PSKS terampil yang berpartisipasi dalam melayani PPKS Tahun 2021

No.	Uraian	PSKS Keseluruhan	PSKS yang Berperan
1.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	14	14
2.	Karang Taruna	60	60
3.	Karang Taruna (UEP)	53	53
4.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	35	35
5.	TKSK	12	12
	Jumlah	185	185

4. Capaian Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	5.517.772.987	100	95,95	95,95%
A	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	%	12.988.600	100	100	100%
1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12.988.600	13	13	100%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	%	3.238.250.287	100	100	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	3.232.310.287	12	12	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2.970.000	1	1	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Tahun SKPD						
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	2.970.000	1	1	100%	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	%	1.251.107.700	100	85,71	85,71%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12.933.000	12	12	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	122.805.400	12	12	100%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	83.323.600	12	12	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	18.509.200	12	12	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material untuk Tapin Expo	Bulan	3.112.500	12	12	0,00%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	30.365.000	12	12	100%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	980.059.000	12	12	100%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	536.215.500	100	59,38	59,38%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Buah	73.585.000	1	0	0%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Buah	139.330.300	25	3	12%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah	323.300.200	70	54	77,14%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	271.730.500	100	100	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	580.000	12	12	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	129.132.000	12	12	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	142.018.500	12	12	100%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	207.480.400	100	100	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	146.329.500	12	12	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Buah	14.200.000	20	20	100%
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Buah	46.950.900	1	1	100%
II	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) PSKS yang terampil	%	1.058.463.200	100	100	100%
A	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	%	1.058.463.200	100	100	100%
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	61.330.000	35	35	100%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	156.045.000	12	12	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Kewenangan Kabupaten/Kota						
	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	804.803.200	39	39	100%
	4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	36.285.000	11	11	100%
III	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PPKS Terkantar (Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan, Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	%	4.981.051.400	77	74,35	96,56%
	A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	%	4.945.811.400	100	95,70	95,70%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	1	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4.716.615.000	1.305	1.029	78,85%
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	28.125.000	175	148	84,57%
	3	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30.898.100	26	26	100%
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	21.120.000	7	7	100%
	5	Pemberian Bimbingan Bimbingan Fisik,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	Orang	86.677.300	10	10	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Mental, Spiritual, dan Sosial	Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	9.000.000	103	103	100%
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyanggah Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8.696.000	9	9	100%
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8.000.000	1	1	100%
9	Pemberian Layanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	12.000.000	2	2	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Kedaruratan	Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	9.000.000	8	8	100%
11	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15.680.000	21	21	100%
B	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%	35.240.000	10	4,11	4,11%
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7.240.000	13	13	100%
2	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	Orang	5.000.000	5	0	0%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota					
	3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3.000.000	5	0	0%
	4	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6.000.000	5	0	%
	5	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14.000.000	5	0	0,00%
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	4.274.222.300	100	100	100%
	A	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-anak terlantar	%	31.975.000	100	100	100%
	1	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	27.345.000	25	25	100%
	2	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	Orang	4.630.000	20	0	0%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Kewenangan Kabupaten/Kota					
B	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	%	4.242.247.300	100	80	80%
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	811.586.600	25.611	20.500	80,04%
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	keluarga	294.270.000	3.739	3.739	100%
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokus	2.686.931.700	25	22	88,00%
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	449.459.000	95	10	10,53%
V	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	%	3.799.530.500	100%	100%	100%
A	Perlindungan Sosial Korban	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	%	3.560.154.100	100	100	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	dan Sosial Kabupaten/Kota					
	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80.840.000	83	83	100%
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	180.550.000	83	83	100%
	3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3.298.764.100	150	150	100%
	B	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	%	239.376.400	100	50	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KINERJA		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	15.456.400	1	0	0%
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	223.920.000	50	50	100%
VI	Program Pengelolaan Taman Makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dalam kondisi baik	%	47.545.100	100%	100%	100%
A	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	%	47.545.100	100	100	100%
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	47.545.100	1	1	100%

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023					
1.	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan jaminan sosial (%)			
2.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh rehabilitasi			
3.	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
PERUBAHAN IKU PADA RENSTRA TAHUN 2018-2023					
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terentaskan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mandiri	-	82,96 %	62,80 %
2.	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-	100 %	100 %

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

SASARAN		Target Tahunan 2022	Realisasi Tahunan 2022	Persentase Capaian 2022	Realisasi Tahunan 2021	Target Tahun 2023
URAIAN	INDIKATOR					
Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3,45	3,60	95,65	3,60	3,35
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	0,45	0,33	126,67	0,28	0,46
	Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	0,04	0,07	25	0,04	0,03

Sumber data : BPS (17 Januari 2023)

E. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Standar Nasional

Standar nasional yang digunakan oleh Dinas Sosial adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Dinas Sosial selama kurun waktu tertentu. Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah anak terlantar yang	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang,	100%	Setiap Tahun

	Anak Terlantar Terlantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			jasa dan sumber daya manusia		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun

Berdasarkan target yang telah ditetapkan diatas, maka realisasi Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	206 Orang	198 Orang	96,12 %	2022	1 Orang Layanan Pendidikan 1 Orang Fasilitas Kependudukan 1 Orang Layanan Kedaruratan 11 Orang Layanan Rujukan 6 Orang Layanan Penelusuran 10 Orang Bimbingan Fisik, mental, spiritual 20 Orang alat bantu 10 Orang paket sandang 146 Orang paket permakanan	1 Orang Layanan Pendidikan 1 Orang Fasilitas Kependudukan 1 Orang Layanan Kedaruratan 11 Orang Layanan Rujukan 6 Orang Layanan Penelusuran 10 Orang Bimbingan Fisik, mental, spiritual 20 Orang alat bantu 10 Orang paket sandang 138 Orang paket permakanan	96,12 %	2022
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	405 Orang	405 Orang	100 %	2022	2 Orang layanan reunifikasi 4 Orang fasilitas kependudukan	2 Orang layanan reunifikasi 4 Orang fasilitas	100 %	2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian
	Terlantar di luar panti					10 Orang layanan rujukan 389 Orang paket permakanan	kependudukan 10 Orang layanan rujukan 389 Orang paket permakanan		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	945 Orang	886 Orang	93,76 %	2022	140 Orang bimbingan fisik, mental, spriritual dan sosial 6 Orang Alat bantu 100 Orang paket sandang 699 Orang paket permakanan	140 Orang bimbingan fisik, mental, spriritual dan sosial 6 Orang Alat bantu 100 Orang paket sandang 640 Orang paket permakanan	93,76 %	2022
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	3 Orang	3 Orang	100 %	2022	3 Orang Paket permakanan,sandang, bimbingan fisik,mental,spiritual dan sosial dan Bimbingan kepada keluarga	3 Orang Paket permakanan,sandang, bimbingan fisik,mental,spiritual dan sosial dan Bimbingan kepada keluarga	100 %	2022
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah	83 Orang	83 Orang	100 %	2022	83 Paket Sembako dan Paket Sandang	83 Paket Sembako dan Paket Sandang	100 %	2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Batas Waktu Capaian
	tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota								

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 hasil capaian 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.988.600 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 8.657.300 (66,65%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.232.310.287 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.645.960.187 (81,86%) dan persentase capaian kinerja terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.970.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.970.000 (100%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.970.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.970.000 (100%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.933.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 12.875.500 (99,56%) dan persentase capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 122.805.400 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 81.277.300 (66,18%) dan persentase capaian kinerja tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 83.323.600 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 82.509.600 (99,02%) dan persentase capaian kinerja tersedianya bahan logistik

kantor di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.509.200 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 16.778.800 (90,65%) dan persentase capaian kinerja tersedianya barang cetak dan penggandaan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
5. Penyediaan Bahan/Material dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.112.500 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.909.000 (93,46 %) dan persentase capaian kinerja tersedianya bahan/material di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran Rp. 30.365.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 11.636.000 (38,32%) dan persentase capaian kinerja tersedianya fasilitasi kunjungan tamu di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 980.059.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 809.303.259 (82,58%) dan persentase capaian kinerja terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.585.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (0%) dan persentase capaian kinerja tersedianya

kendaraan dinas operasional atau lapangan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 0%.

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 139.330.300 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 40.239.000 (28,88%) dan persentase capaian kinerja tersedianya peralatan dan mesin lainnya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 323.300.200 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 211.170.000 (65,32%) dan persentase capaian kinerja tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 580.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 550.000 (94,83 %) dan persentase capaian kinerja tersedianya jasa surat menyurat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 129.132.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 43.381.485 (33,59%) dan persentase capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 142.018.500 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 99.500.000 (70,06%)

dan persentase capaian kinerja tersedianya jasa pelayanan umum kantor di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 146.329.500 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 102.649.300 (70,15%) dan persentase capaian kinerja tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.200.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 5.005.000 (35,25%) dan persentase capaian kinerja terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 70%.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.950.900 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 14.175.700 (30,19%) dan persentase capaian kinerja terpeliharanya/terehabilitasinya gedung kantor dan bangunan lainnya di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

A. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.330.000 (APBD)

dengan realisasi anggaran Rp. 60.175.000 (98,12%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya peningkatan kemampuan potensi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Tapin adalah 100%.

2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 156.045.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 153.590.000 (98,43 %) dan persentase capaian kinerja terlaksananya peningkatan kemampuan potensi bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 804.803.200 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 684.545.800 (85,06%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya peningkatan kemampuan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan Masyarakat Kabupaten Tapin adalah 100%.
4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.285.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 17.015.000 (46,89%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah 100%.

III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1. Penyediaan Permakanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.716.615.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 3.964.010.000 (84,04%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya penyediaan permakanan untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial adalah 78,85%.
2. Penyediaan Sandang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.125.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 22.050.000 (78,40%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya penyediaan sandang untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial adalah 84,57%.
3. Penyediaan alat bantu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.898.100 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 30.898.100 (100,00%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya penyediaan alat bantu adalah 100%.
4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 86.677.300,- (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 57.899.300 (49,36%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial adalah 66,67%.

5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.120.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 3.500.000 (16,57%)
6. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (0%)
7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak pagu anggaran sebesar Rp. 8.696.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 696.000 (8,00%)
8. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pagu anggaran sebesar Rp. 8.000.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (,0%)
9. Pemberian Layanan Kedaruratan pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (,0%)
10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (0%)
11. Pemberian Layanan Rujukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.680.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.500.000 (15,94%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pemberian Layanan Rujukan adalah 100%.

B. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.240.000

(APBD) dan realisasi anggaran Rp. 7.240.000 (100,00%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial adalah 100%.

2. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 0 (0%)
3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 0 (0%)
4. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 1.000.000 (16,67%)
5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.000.000 (APBD) dan realisasi anggaran Rp. 0 (0%)

IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

A. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- i. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.345.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 1.180.000 (4,32%)
- ii. Rujukan Anak-Anak Terlantar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.630.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (0%)

B. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.

811.586.600 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 682.116.000 (84,05%)

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 294.270.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 242.892.027 (82,54%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten Tapin adalah 100%.
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.686.931.700 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.484.414.500 (92,46%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah 88%.
4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 449.459.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 56.385.000 (12,55%)

V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

A. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.840.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 15.770.000 (19,51%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya penyediaan makanan untuk korban bencana alam dan sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.
2. Penyediaan Sandang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 180.550.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 120.980.000 (67,01%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya penyediaan sandang untuk korban bencana alam dan sosial Kabupaten Tapin adalah 100%.

3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.298.764.100 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 2.520.170.100 (76,40%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya penanganan khusus bagi kelompok rentan adalah 77,33%.

B. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.456.400 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 0 (0%)
2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 223.920.000 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 78.660.000,00 (35,13%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana untuk masyarakat Kabupaten Tapin adalah 100%.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

A. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.545.100 (APBD) dengan realisasi anggaran Rp. 42.006.500 (88,35%) dan persentase capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Tapin adalah 100%.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data umum kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Tapin, dari Kepala SKPD sampai dengan Staf, serta para Pejabat Fungsional, hanya berjumlah 19 orang ASN. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya Sumber Daya Manusia / ASN yang ada di lingkungan Dinas Sosial. Pada Analisis Jabatan, belum ada Jabatan Fungsional Umum yang memang sangat diperlukan belum terisi baik di Sekretariat maupun bidang-bidang. Contohnya saja jabatan Pengadministrasian Kepegawaian, Analis dan Pengolah Data di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Lain-lain.

Meskipun terdapat kendala kurangnya pegawai dalam menangani banyaknya kegiatan, sebagian besar SDM di Dinas Sosial Kabupaten Tapin berusaha semaksimal mungkin untuk berkinerja menunjang dalam keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial dengan dibantu Tenaga Kontrak yang direkrut dengan anggaran APBD.

Namun jika semua pejabat manajerial/Ess. III bekerja lebih maksimal dan ada penambahan jumlah pegawai sesuai dengan keahlian yang sangat dibutuhkan dalam pengadministrasian, pengelolaan dan pengolahan data, dan analisis serta penanganan penanganan masalah-masalah sosial dapat dipenuhi, tentu akan sangat berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja dan sasaran strategis lebih maksimal lagi secara keseluruhan dan berinovasi menjadi unggul secara komprehensif baik dalam tata kelola perkantoran, pelayanan, maupun penanganan-penanganan di lapangan yang cepat dan tanggap.

2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu organisasi tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dukungan

sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi.

Pada Dinas Sosial, ketersediaan sarana sudah memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Namun untuk Prasarana, Dinas Sosial belum memiliki Gedung Kantor sendiri.

Dinas Sosial masih meminjam Gedung milik Dinas Ketenagakerjaan untuk dijadikan sebagai Gedung Kantor. Gedung tersebut relatif kecil, ruangan yang sempit, tidak memadai, tidak representatif, khususnya ruangan untuk bidang-bidang. Bahkan untuk pelayanan pengaduan masyarakat “SAPANTUN” Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) juga masih meminjam Gedung milik Dinas Ketenagakerjaan untuk dijadikan tempat pelayanan.

Hal tersebut tentu membuat kurang nyaman dan dapat menghambat dalam pelaksanaan pekerjaan yang berimbas pada pencapaian sasaran strategis yang lebih maksimal.

3. Anggaran

Sasaran strategis pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial didukung dengan pagu anggaran yang ada pada DPPA Dinas Sosial Tahun 2022 sebesar Rp. 19.678.585.487,00 dan terserap sebesar Rp. 15.444.210.758 (78,48%), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.234.747.729 (21,52%).

Dari sisa anggaran tersebut, efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.234.747.729 dan sebesar Rp. 380.555.700 merupakan anggaran yang tidak terpakai karena ada kegiatan yang tidak terlaksana.

Pada tahun 2022 terdapat refocusing pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin yaitu sebesar Rp. 115.392.132,-. Dana refocusing tersebut dimaksudkan untuk penanganan dampak inflasi Tahun 2022 berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 Tanggal 05 September 2022.

* Perhitungan Anggaran Kegiatan yang tidak terlaksana

Sub Kegiatan	Anggaran yang tidak terpakai (Rp)	Keterangan
Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	202.517.200	Perubahan paket pekerjaan KUBE dan UEP dilakukan pada saat APBD perubahan, dikarenakan hal tersebut terkendala dalam waktu pelaksanaan sehingga kegiatannya tidak dapat dilaksanakan.
Penyediaan Makanan	65.070.000	Intensitas kejadian bencana tidak sering terjadi, sehingga persediaan stok barang masih banyak. Hal ini menyebabkan pada tahun 2022, Dinas Sosial tidak banyak membeli barang persediaan makanan untuk menghindari penumpukan stok.
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	19.270.000	Pada Tahun 2022 pengaduan yang masuk di LK3 langsung ditindak lanjuti ke alamat pengadu (Home Visit) sehingga makan minum rapat tidak terealisasi.
Total	286.857.200	

G. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis “Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan” didukung oleh Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian 100%. Keberhasilan ini tentunya dengan tersedia data PPKS untuk bahan penentuan sasaran dan kerjasama yang baik dari pelaksana di lapangan

yang bekerja secara optimal. Pelaksana lapangan yang berperan dalam pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan, diantaranya TKSK, PSM, PKH, Pendamping Sosial, dan lain sebagainya, serta Instansi-instansi terkait secara langsung dalam program ini. Selain itu juga adanya dukungan Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi. Dan didukung oleh Program Rehabilitasi Sosial dengan capaian 96,56% yaitu dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan fisik bagi disabilitas agar mereka mandiri, tidak bergantung pada bantuan, mampu memberikan nilai ekonomi, dapat mengaplikasikan hasil pelatihan keterampilan berusaha yang diberikan pada kehidupan sehari-hari sehingga dari keterampilannya tersebut mampu menghasilkan/berpenghasilan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis Strategis “Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” didukung oleh Program Pemberdayaan Sosial dengan capaian 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada PSKS, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 tetap terlaksana dengan baik yang dilaksanakan secara bertahap serta menerapkan protokol kesehatan hal ini atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang tentunya hal ini berdampak positif untuk penambahan wawasan dan kapasitas terhadap PSKS yang ada di Kabupaten Tapin dalam memberikan dukungan Pelayanan Sosial di Masyarakat.

H. Perbandingan Indikator Dinas Sosial Kabupaten Tapin Dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Pada Tahun 2022

No.	Indikator	Perbandingan dengan			
		Dinsos Kab. Tapin		Dinsos Prov. KalSel	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase PPKS yang mandiri	2,5 %	1,57%	19,29%	23,60%

Sumber : LKjIP Dinsos Prov KalSel, LKjIP Dinsos Kab. Tapin

I. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama Tahun 2022 Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Sosial Kabupaten Tapin mendapatkan Anggaran sebesar sebesar Rp 19.678.585.487,- dengan serapan anggaran yang dapat dilakukan mencapai 78,48%, dengan sisa anggaran (Silpa) sebesar Rp. 4.234.374.729,-

Pagu dan realisasi dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
I	BELANJA OPERASI	19.124.024.987	15.189.301.758	79,43 %
1	Belanja Pegawai	3.234.965.287	2.645.960.187	81,79 %
2	Belanja Barang dan Jasa	8.983.361.600	6.374.843.471	70,96 %
3	Belanja Bantuan Sosial	6.905.698.100	6.168.498.100	89,32 %
II	BELANJA MODAL	554.560.500	254.909.000	45,97 %
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	554.560.500	254.909.000	45,97 %
	TOTAL	19.678.585.487	15.444.210.758	78,48%

Sementara anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.517.772.987	4.194.517.431	76,02	1.323.255.556
A	X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.988.600	8.657.300	66,65	4.331.300
1	X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.988.600	8.657.300	66,65	4.331.300
B	X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.238.250.287	2.651.900.187	81,89	586.350.100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.232.310.287	2.645.960.187	81,86	586.350.100
2	X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.970.000	2.970.000	100,00	-
3	X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.970.000	2.970.000	100,00	-

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
C	X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.251.107.700	1.017.289.459	81,31	233.818.241
1	X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.933.000	12.875.500	99,56	57.500
2	X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.805.400	81.277.300	66,18	41.528.100
3	X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.323.600	82.509.600	99,02	814.000
4	X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.509.200	16.778.800	90,65	1.730.400
5	X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	3.112.500	2.909.000	93,46	203.500
6	X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.365.000	11.636.000	38,32	18.729.000
7	X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980.059.000	809.303.259	82,58	170.755.741
d	X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	536.215.500	251.409.000	46,89	284.806.500
1	X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.585.000	-	0,00	73.585.000
2	X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.330.300	40.239.000	28,88	99.091.300
3	X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	323.300.200	211.170.000	65,32	112.130.200

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
	Kantor atau Bangunan Lainnya				
E	X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.730.500	143.431.485	52,78	128.299.015
1	X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	580.000	550.000	94,83	30.000
2	X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.132.000	43.381.485	33,59	85.750.515
3	X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.018.500	99.500.000	70,06	42.518.500
4	X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.480.400	121.830.000	58,72	85.650.400
5	X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.329.500	102.649.300	70,15	43.680.200
6	X.XX.01.1.09.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	5.005.000	35,25	9.195.000
7	X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.950.900	14.175.700	30,19	32.775.200

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
II	X.XX.01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.058.463.200	915.325.800	86,48	143.137.400
A	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.058.463.200	915.325.800	86,48	143.137.400
1	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	61.330.000	60.175.000	98,12	1.155.000
2	1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	156.045.000	153.590.000	98,43	2.455.000
3	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	804.803.200	684.545.800	85,06	120.257.400
4	1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	36.285.000	17.015.000	46,89	19.270.000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
III	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.981.051.400	4.089.793.400	82,11	891.258.000
A	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.945.811.400	4.081.553.400	82,53	864.258.000
1	1.06.04.2.01.01 Penyediaan permakanaan	4.716.615.000	3.964.010.000	84,04	752.605.000
2	1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	28.125.000	22.050.000	78,40	6.075.000
3	1.06.04.2.01.03 Penyediaan alat bantu	30.898.100	30.898.100	100,00	-
4	1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	21.120.000	3.500.000	16,57	17.620.000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
5	1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	86.677.300	57.899.300	66,80	28.778.000
6	1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	9.000.000		0,00	9.000.000
7	1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	8.696.000	696.000	8,00	8.000.000
8	1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8.000.000		0,00	8.000.000
9	1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	12.000.000		0,00	12.000.000
10	1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	9.000.000		0,00	9.000.000
11	1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	15.680.000	2.500.000	15,94	13.180.000
B	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	35.240.000	8.240.000	23,38	27.000.000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.240.000	7.240.000	100,00	-
2	1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000		0,00	5.000.000
3	1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.000.000		0,00	3.000.000
4	1.06.04.2.02.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	1.000.000	16,67	5.000.000
5	1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.000.000		0,00	14.000.000
IV	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.274.222.300	3.466.987.527	81,11	807.234.773
A	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	31.975.000	1.180.000	3,69	30.795.000
1	1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-anak Terlantar	27.345.000	1.180.000	4,32	26.165.000
2	1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-anak Terlantar	4.630.000	-	0,00	4.630.000
B	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.242.247.300	3.465.807.527	81,70	776.439.773

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	811.586.600	682.116.000	84,05	129.470.600
2	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	294.270.000	242.892.027	82,54	51.377.973
3	1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.686.931.700	2.484.414.500	92,46	202.517.200
4	1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	449.459.000	56.385.000	12,55	393.074.000
V	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.799.530.500	2.735.580.100	72,00	1.063.950.400
A	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3.560.154.100	2.656.920.100	74,63	903.234.000
1	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	80.840.000	15.770.000	19,51	65.070.000
2	1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	180.550.000	120.980.000	67,01	59.570.000
3	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.298.764.100	2.520.170.100	76,40	778.594.000
B	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	239.376.400	78.660.000	32,86	160.716.400
1	1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	15.456.400	-	0,00	15.456.400

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
2	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	223.920.000	78.660.000	35,13	145.260.000
VI	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	47.545.100	42.006.500	88,35	5.538.600
A	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.545.100	42.006.500	88,35	5.538.600
1	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	47.545.100	42.006.500	88,35	5.538.600
	TOTAL	19.678.585.487	15.444.210.758	78,48	4.234.374.729

Dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2022 dari tabel di atas, terdapat sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp. 19.678.585.487,- dengan realisasi yang mencapai Rp. 15.444.210.758,- (78,48%).

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-sasaran strategisnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas Kabupaten Tapin, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tapin sebagai jabaran visi, misi dan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran, digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
3.	55 % s.d. 75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

A. Kesimpulan Capaian Kinerja

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

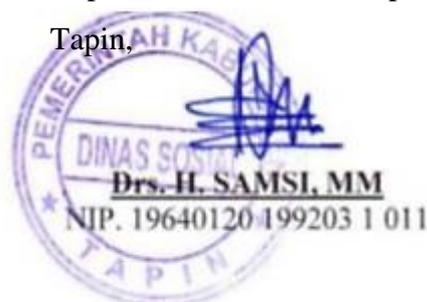
1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase Capaian Kinerja lebih dari 75% s.d 100% atau Baik (B) sebanyak 1 IKU,
2. Indikator Kinerja Utama dengan Persentase Capaian Kinerja 55% s.d. 75% atau Cukup (C) sebanyak 1 IKU.

3. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah sebesar 81,40 %.

B. Saran Untuk Perbaikan Kinerja

Untuk melihat prospek ke depan, Dinas Sosial Kabupaten Tapin merasakan perlu adanya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang baik berupa menambah jumlah peserta pelatihan keterampilan yang didukung oleh tersedianya dana anggaran agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Sehingga dengan keterampilan yang telah diperoleh dapat membantu mereka memenuhi kehidupan hidup sehari-hari. Serta meningkatkan bantuan modal usaha berupa KUBE dan UEP bagi PPKS serta pelatihan keterampilan bagi PPKS yang dapat membuat mereka mandiri dan tidak bergantung pada pemberian bantuan lagi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan bagi mereka. Selain itu diharapkan juga peningkatan keterampilan PSKS dan diberdayakan serta berpartisipasi dalam memberikan pelayanan yang baik bagi PPKS.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Tapin,



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS SOSIAL

Jl. Gubernur Aberani Sulaiman No. 129 Telp. (0517) 31239 Fax. (0517) 32505

Kode Pos 71111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPIN

NOMOR 037 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP) PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupate Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
3. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapin;
4. melakukan pemantauan dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyusunan produk hukum terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang diterbitkan organisasi.

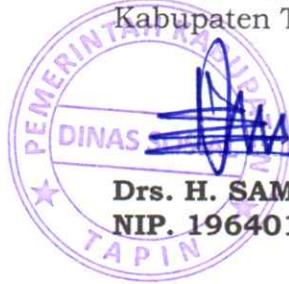
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 22 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tapin,



Drs. H. SAMSI, MM
NIP. 19640120 199203 1 011

Tembusan :

1. Bupati Tapin di Rantau
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tapin di Rantau
5. Anggota TIM.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 037 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 Januari 2022

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas
2.	KETUA	Sekretaris Dinas
3.	SEKRETARIS	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
4.	TIM TEKNIS	1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
5.	ANGGOTA	1. Penyuluh Sosial 2. Pekerja Sosial 3. Kasubbag Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Kasubbag Keuangan

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 22 Januari 2022



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tapin,

Drs. H. SAMSI, MM
NIP. 19640120 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS SOSIAL

Jl. Gubernur Aberani Sulaiman No. 129 Telp. (0517) 31239 Fax. (0517)
32505

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra, maka dilaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 21 Oktober 2021



**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tapin,**

Drs. H. SAMSI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640120 199203 1 011

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 59 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR UTAMA
 DINAS SOSIAL, KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN
 SEBELUM PERUBAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan jaminan sosial	<p>PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan PMKS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS keseluruhan}} \times 100 \%$</p>	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung jawab	Sumber Data
2	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial	<p>PMKS yang menghadapi hambatan , kesulitan dan gangguan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan. Seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia yang tidak potensial. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan PMKS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah PMKS keseluruhan}} \times 100 \%$</p>	Bidang Rehabilitasi Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p>PSKS adalah segala sesuatu yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam maupun organisasi sosial. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan meningkatnya peran PSKS dalam memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS sehingga kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi.</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah PSKS yang berperan dalam melayani PMKS}}{\text{Jumlah PSKS keseluruhan}} \times 100\%$</p>	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN
SETELAH PERUBAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	5	6	7
1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	<p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)</p> <p><u>Makna indikator :</u> Mengindikasikan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri. Definisi operasional yg mengindikasikan PPKS yang diantaskan yaitu memperbaiki,meningkatkan keadaannya menjadi lebih baik dibanding sebelumnya</p> <p><u>Kriteria Mandiri :</u> 1. Bisa mengakses pekerjaan atau memiliki usaha sendiri 2. Tidak bergantung pada bantuan 3. Mampu memberikan nilai ekonomi 4. Dapat mengaplikasikan hasil pelatihan keterampilan berusaha yang diberikan pada kehidupan sehari-hari 5. Dari keterampilannya tersebut mampu menghasilkan/berpenghasilan</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Persentase PPKS yang Mandiri merupakan indikator yang jelas digunakan untuk menghitung besaran PPKS yang sudah mandiri, karena dengan kemandirian PPKS akan mengentaskan jumlah PPKS tersebut.</p> <p><u>Rumus :</u> <u>Jumlah PPKS yang Mandiri</u> x100% Jumlah PPKS keseluruhan</p>	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Rehabilitasi Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
2	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<p>Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p><u>Makna indikator :</u> Mengindikasikan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil</p> <p><u>Kriteria Terampil :</u> Cakap dalam menyelesaikan tugas Kesejahteraan Sosial, mampu dan cekatan dalam melayani PPKS</p> <p>Rumus :</p> <p>$\frac{\text{Jumlah partisipasi SDM PSKS yang terampil}}{\text{Jumlah SDM PSKS yang terampil}} \times 100 \%$</p>	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)



Kepala Dinas,

Drs. H. SAMSI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640120 199203 1 011

DOKUMEN RENAKSI

Dinas Sosial
2022-MURNI

#	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022	TARGET PER TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
SASARAN STRATEGIS 1 :PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) YANG TERENTASKAN							
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persentase	2,5	0%	1%	1%	0,5%
SASARAN STRATEGIS 2 :MENINGKATNYA PARTISIPASI POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) YANG TERAMPIL DALAM MENANGANI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)							
1	Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase	100	25%	25%	25%	25%

Dokumen MONEV RENAKSI 2022

Dinas Sosial
2022-MURNI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat											
						X.XX.01-PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp.4.792.896.694,00					1. Drs. H Samsi, MM 2. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I
		46,15%	23,08%	15,77%	15%		Persentase dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar		46,15%	23,08%	15,77%	15%	
		25%	25%	25%	25%		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		25%	25%	25%	25%	
		25%	25%	25%	25%		Persentase pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan sesuai standar		25%	25%	25%	25%	
		25%	25%	25%	25%		Persentase pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar		25%	25%	25%	25%	
						X.XX.01.2.08-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.9.488.600,00					1. FENNY MARIATI, SE
		46,15%	23,08%	15,77%	15%		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai standar		46,15%	23,08%	15,77%	15%	
						1.06.01.2.01.06-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp. 9.488.600,00					1. FENNY MARIATI, SE 2. MUHAMMAD AL FAJAR, S.E.
		6 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
						X.XX.01.2.08-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp.5.940.000,00					1. IHYAL ISLAMI, A.md
		0%	50%	0%	50%		Persentase dokumen laporan keuangan yang akuntabel		0%	50%	0%	50%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAM	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						X.XX.01.2.02.05-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp. 2.970.000,00					1. IHYAL ISLAMI, A.md 2. SUGIARTI, SE
		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	
						X.XX.01.2.02.07-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp. 2.970.000,00					1. IHYAL ISLAMI, A.md 2. SUGIARTI, SE
		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
						X.XX.01.2.08-Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp.1.151.281.200,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		25%	24,32%	24,68%	26%		Persentase dokumen sarana dan prasarana yang baik		25%	24,32%	24,68%	26%	
						X.XX.01.2.06.01-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp. 2.049.000,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	
						X.XX.01.2.06.02-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp. 114.286.300,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	
						X.XX.01.2.06.04-Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp. 83.323.600,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Samsuri, 3. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	
						X.XX.01.2.06.05-Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp. 13.090.600,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						X.XX.01.2.06.07-Penyediaan Bahan/Material		Rp. 1.823.700,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		0 Kali	0 Kali	0 Kali	1 Kali		Jumlah Penyediaan Bahan/material untuk Tapin Expo		0 Kali	0 Kali	0 Kali	1 Kali	
						X.XX.01.2.06.08-Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp. 48.365.000,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu Penyediaan fasilitas kunjungan tamu		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	
						X.XX.01.2.06.09-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp. 888.343.000,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	
						X.XX.01.2.08-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.251.006.800,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		25%	25%	25%	25%		Persentase dokumentasi pelayanan surat menyurat yang baik		25%	25%	25%	25%	
						X.XX.01.2.08.01-Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp. 580.000,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	
						X.XX.01.2.08.02-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp. 87.132.000,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	
						X.XX.01.2.08.04-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp. 163.294.800,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						X.XX.01.2.06-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.142.910.500,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		25%	25%	25%	25%		Persentase aset yang tercatat dengan baik		9,09%	69,7%	11,21%	10%	
						X.XX.01.2.09.01-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp. 118.652.500,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	
						X.XX.01.2.09.06-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp. 14.200.000,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. VIENA APRILLIA RAHMA, S.M. 3. Deny Fakhriadi, A.Md
		0 Buah	20 Buah	0 Buah	0 Buah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 Buah	20 Buah	0 Buah	0 Buah	
						X.XX.01.2.09.09-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp. 10.058.000,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		0 Buah	0 Kali	1 Buah	0 Buah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pemeliharaan/Rehabilitasi		0 Buah	0 Buah	1 Buah	0 Buah	
						X.XX.01.2.08-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp.3.232.269.594,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		25%	25%	25%	25%		Persentase pegawai yang administrasi kepegawaianya dilayani secara tertib		25%	25%	25%	25%	
						X.XX.01.2.02.01-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp. 3.232.269.594,00					1. MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd.I 2. Deny Fakhriadi, A.Md
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan		Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	
2	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri											

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
yang Terentaskan													
						1.06.04-PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Rp.5.071.050.300,00					1. Drs. H Samsi, MM 2. CHANDRA DWI SAPUTRA, S.IP, M.M
		0 %	25%	25%	27%		Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan, Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial		0%	25%	25%	24,35%	
						1.06.04.2.01-Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Rp.4.707.923.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 %	67,83%	0%	28,17%		Persentase PPKS Terlantar (Anak terlantar, Lansia terlantar,Gelandangan, Pengemis) yang mendapatkan distribusi Bantuan Sosial		0%	67,83%	0%	27,87%	
						1.06.04.2.01.01-Penyediaan Permakanan		Rp. 4.639.245.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	1204 Orang	0 Orang	0 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	1007 Orang	0 Orang	0 Orang	
						1.06.04.2.01.02-Penyediaan Sandang		Rp. 11.250.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Paket	60 Paket	Paket	Paket		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Paket	60 Paket	0 Paket	0 Paket	
						1.06.04.2.01.03-Penyediaan Alat Bantu		Rp. 24.968.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	20 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
						1.06.04.2.01.04-Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp. 6.520.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	2 Orang	
						1.06.04.2.01.05-Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,		Rp. 8.440.000,00					1. TASALBIAH, S,AP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Spiritual, dan Sosial							
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	5 Orang		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	178 Orang	
						1.06.04.2.01.06-Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Rp. 3.000.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	3 Keluarga		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	128 Keluarga	
						1.06.04.2.01.07-Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Rp. 2.500.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	18 Orang		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	4 Orang	
						1.06.04.2.01.08-Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp. 3.000.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
						1.06.04.2.01.10-Pemberian Layanan Kedaruratan		Rp. 3.000.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
						1.06.04.2.01.11-Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Rp. 3.000.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	2 Orang	
						1.06.04.2.01.12-Pemberian Layanan Rujukan		Rp. 3.000.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	5 Orang		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						1.06.04.2.01-Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Rp.24.240.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 %	5%	0%	5%		Persentase PPKS Lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar		0 %	1,24%	0%	2,87%	
						1.06.04.2.01.05-Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Rp. 7.240.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	4 Orang	0 Orang	8 Orang		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	4 Orang	0 Orang	8 Orang	
						1.06.04.2.01.07-Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Rp. 5.000.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
						1.06.04.2.01.08-Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp. 3.000.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
						1.06.04.2.01.11-Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Rp. 6.000.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
						1.06.04.2.01.12-Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp. 3.000.000,00					1. TASALBIAH, S,AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	
						1.06.04.2.01-Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak		Rp.338.887.300,00					1. KUSMADI, S,AP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
		0 %	0 %	0 %	36 %		Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar) yang mendapatkan Bantuan Sosial		0 %	0 %	0 %	32,43 %	
						1.06.04.2.01.01-Penyediaan Permakanan		Rp. 243.770.000,00					1. KUSMADI, S.AP
		0 Orang	172 Orang	0 Orang	0 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	22 Orang	0 Orang	0 Orang	
						1.06.04.2.01.02-Penyediaan Sandang		Rp. 2.250.000,00					1. KUSMADI, S.AP
		0 Paket	10 Paket	0 Paket	0 Paket		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Paket	10 Paket	0 Paket	0 Paket	
						1.06.04.2.01.04-Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp. 6.480.000,00					1. KUSMADI, S.AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	5 Orang	
						1.06.04.2.01.05-Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Rp. 68.887.300,00					1. KUSMADI, S.AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	15 Orang		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang	
						1.06.04.2.01.06-Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Rp. 3.000.000,00					1. KUSMADI, S.AP
		0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	2 Keluarga		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	25 Keluarga	
						1.06.04.2.01.07-Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Rp. 2.500.000,00					1. KUSMADI, S.AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	17 Orang		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor		0 Orang	0 Orang	0 Orang	1 Orang	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota							
						1.06.04.2.01.08-Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 3.000.000,00						1. KUSMADI, S.AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	1 Orang		
						1.06.04.2.01.10-Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 3.000.000,00						1. KUSMADI, S.AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang		
						1.06.04.2.01.11-Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 3.000.000,00						1. KUSMADI, S.AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	6 Orang		
						1.06.04.2.01.12-Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 3.000.000,00						1. KUSMADI, S.AP
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	5 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	11 Orang		
						1.06.05-PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp.436.000.000,00						1. Drs. H Samsi, MM 2. IWAN SETYAWAN, S.Sos
		0 %	0 %	0 %	2,5%	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi dalam permodalan		0 %	0 %	0 %	1,01%		
						1.06.05.2.02-Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.436.000.000,00						1. MUHAMMAD ABID WARDHANA,
		0 %	0 %	0%	2,5%	Persentase Fakir Miskin yang lulus seleksi fasilitasi bantuan UEP/KUBE		0 %	0 %	0%	1,01%		
						1.06.05.2.02.04-Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 436.000.000,00						1. MUHAMMAD ABID WARDHANA,
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	70 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang		
						1.06.05-PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp.262.830.700,00						1. Drs. H Samsi, MM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
													2. IWAN SETYAWAN, S.Sos
		0 %	0 %	0 %	100%		Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		0 %	0 %	0 %	100%	
						1.06.05.2.02-Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.233.958.200,00					1. MUHAMMAD ABID WARDHANA,
		0 %	0 %	0%	100%		Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang mendapatkan bantuan Sosial tepat sasaran sesuai dengan data		0 %	0 %	0%	100%	
						1.06.05.2.02.03-Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp. 233.958.200,00					1. MUHAMMAD ABID WARDHANA,
		0 Lokus	0 Lokus	25 Lokus	0 Lokus		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Lokus	0 Lokus	22 Lokus	0 Lokus	
						1.06.05.2.02-Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Rp.28.872.500,00					1. MUHAMMAD ABID WARDHANA,
		0 %	0 %	0 %	100%		Persentase Anak terlantar yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial		0 %	0 %	0 %	100%	
						1.06.05.2.01.01-Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Rp. 24.242.500,00					1. MUHAMMAD ABID WARDHANA,
		0 orang	0 orang	0 orang	25 orang		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0 orang	0 orang	25 orang	
						1.06.05.2.01.02-Rujukan Anak-Anak Terlantar		Rp. 4.630.000,00					1. MUHAMMAD ABID WARDHANA,
		0 orang	0 orang	0 orang	20 orang		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	
						1.06.05-PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Rp.524.340.000,00					1. Drs. H Samsi, MM 2. IWAN SETYAWAN, S.Sos
		0 %	5 %	10 %	85%		Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir		0 %	5 %	10 %	65%	
						1.06.05.2.02-Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.524.340.000,00					1. MUHAMMAD ABID WARDHANA,

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
		0 %	5 %	10%	85%		Persentase Data Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi		0 %	5 %	10%	65%	
						1.06.05.2.02.01-Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 258.970.000,00					1. MUHAMMAD ABID WARDHANA,
		0 Orang	0 Orang	0 Orang	25.611 Orang		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		0 Orang	0 Orang	0 Orang	20500 Orang	
						1.06.05.2.02.02-Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 265.370.000,00					1. MUHAMMAD ABID WARDHANA,
		0 Keluarga	0 Keluarga	2.667 Keluarga	1.072 Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		0 Keluarga	0 Keluarga	2.667 Keluarga	1.072 Keluarga	
						1.06.06-PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Rp.600.990.400,00					1. Drs. H Samsi, MM 2. IWAN SETYAWAN, S.Sos
		100 %	0%	0%	0%		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani		100 %	0%	0%	0%	
						1.06.06.2.01-Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Rp.413.114.000,00					1. Akhmad Hamdani, S.ST
		100 %	0%	0%	0%		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 %	0%	0%	0%	
						1.06.06.2.01.01-Penyediaan Makanan		Rp. 195.064.000,00					1. Akhmad Hamdani, S.ST
		25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		23 Orang	16 Orang	18 Orang	26 Orang	
						1.06.06.2.01.02-Penyediaan Sandang		Rp. 218.050.000,00					1. Akhmad Hamdani, S.ST
		25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		23 Orang	16 Orang	18 Orang	26 Orang	
						1.06.06.2.02-Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Rp.187.876.400,00					1. Akhmad Hamdani, S.ST
		0 %	0%	50%	50%		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat		0 %	0 %	50%	0%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
							terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						
						1.06.06.2.02.01-Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Rp. 16.706.400,00					1. Akhmad Hamdani, S.ST
		0 Kampung	0 Kampung	0 Kampung	1 Kampung		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Kampung	0 Kampung	0 Kampung	0 Kampung	
						1.06.06.2.02.02-Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Rp. 171.170.000,00					1. Akhmad Hamdani, S.ST
		0 Orang	0 Orang	50 Orang	0 Orang		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0 Orang	50 Orang	0 Orang	
						1.06.06-PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Rp.4.363.500.100,00					1. Drs. H Samsi, MM 2. IWAN SETYAWAN, S.Sos
		0 %	0%	1%	0,92%		Persentase Rumah Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang layak huni		0 %	0%	1,02%	0,46%	
						1.06.06.2.01-Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Rp.4.363.500.100,00					1. Akhmad Hamdani, S.ST
		0 %	0%	1%	0,92%		Persentase Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu		0 %	0%	1,02%	0,46%	
						1.06.06.2.01.04-Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Rp. 4.363.500.100,00					1. IWAN SETYAWAN, S.Sos
		0 Rumah	0 Rumah	150 Rumah	150 Rumah		Jumlah rumah masyarakat miskin yang direhab		0 Rumah	0 Rumah	80 Rumah	36 Rumah	
3	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)											
						1.06.02-PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Rp.1.304.144.900,00					1. Drs. H Samsi, MM 2. RINA SARI, SH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
		0 %	15 %	20%	65%		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) PSKS yang terampil		0 %	0 %	35%	65%	
						1.06.02.2.03-Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Rp.1.304.144.900,00					1. HJ SUSILAWATI, S.Sos
		0 %	15%	15%	15,56%		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina		0 %	0%	0%	28,37%	
						1.06.02.2.03.01-Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp. 48.790.000,00					1. HJ SUSILAWATI, S.Sos
		0 orang	0 orang	0 orang	35 orang		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0 orang	0 orang	35 orang	
						1.06.02.2.03.02-Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp. 146.630.000,00					1. HJ SUSILAWATI, S.Sos
		0 orang	0 orang	0 orang	12 orang		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0 orang	0 orang	12 orang	
						1.06.02.2.03.04-Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp. 1.081.254.900,00					1. HJ SUSILAWATI, S.Sos
		0 Lembaga	20 Lembaga	19 Lembaga	0 Lembaga		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Lembaga	20 Lembaga	19 Lembaga	0 Lembaga	
						1.06.02.2.03.05-Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Rp. 27.470.000,00					1. HJ SUSILAWATI, S.Sos
		0 Sertifikat	0 Sertifikat	0 Sertifikat	11 Sertifikat		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Sertifikat	0 Sertifikat	0 Sertifikat	11 Sertifikat	
						1.06.07-PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Rp.47.545.100,00					1. Drs. H Samsi, MM 2. RINA SARI, SH
		100%	0%	0%	0%		Persentase Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik		100%	0%	0%	0%	
						1.06.07.2.01-Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp.47.545.100,00					1. SAHRAN, S.A.P.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAM	KERANGKA LOGIS	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI IKU				UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
		100%	0%	0%	0%		Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dalam kondisi baik		100%	0%	0%	0%	
						1.06.07.2.01.02-Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp. 47.545.100,00					1. SAHRAN, S.AP. 2. Syahrani, 3. Akhmad Yani,
		1 Buah	0 buah	0 buah	0 buah		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		1 buah	0 buah	0 buah	0 buah	

MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA
RENCANA AKSI DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN 2022

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun Ke-									
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022 S.D TW IV		2023	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	55	55%	2.608.671.732	55,00%	398.604.300	55,05%	512.761.795	55,10%	538.399.885	55,12%	565.319.879	55,14%	#####	111.357.900	55,95%	400.814.700						
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan (%)	2,26	2%	5.740.009.450	2,26%	4.024.579.700	2,27%	398.000.000	2,28%	417.900.000	2,29%	438.795.000	2,30%	#####	4.853.160.000	4,00%	235.145.000						
2	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan (%)	35	35%	3.073.877.048	35,00%	559.698.100	35,05%	619.295.600	35,10%	625.260.380	35,12%	631.523.399	35,14%	#####	9.410.000	33,00%	41.072.500						
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	3	3%	2.443.623.243	3,00%	471.125.000	3,02%	486.424.000	3,04%	490.745.200	3,06%	495.282.460	3,08%	#####	12.180.000	2,30%	6.810.000						
			Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)		100%																				
			a. program	100	100%																				
			b. kegiatan	100	100%																				
			Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)		100%																				
			a. kinerja	100	100%																				
			b. anggaran		100%																				
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	10	10%	2.613.348.947	10,00%	491.975.500	10,05%	506.574.275	10,10%	521.902.989	10,12%	537.998.138	10,14%	#####	250.151.824	1,00%	158.838.000						
			Persentase RENJA SKPD Mitra Kerja Bidang sosial budaya dan SDM yang konsisten dengan RENSTRA	100																					
			Persentase penyerapan anggaran dan persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah Mitra Kerja Bidang sosial budaya dan SDM	100																					
3	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS (%)	56,1	56%	5.538.291.487	56,10%	682.968.000	56,15%	1.126.492.500	56,16%	1.182.817.125	56,17%	1.241.957.981	56,18%	#####	607.632.000	52%	231.949.000						
		Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	1.124.945.574	100,00%	222.612.000	100,00%	223.742.600	100,00%	224.929.730	100,00%	226.176.217	100,00%	#####	0%	-	100%	1.800.000					

Monitoring dan evaluasi Renstra Dinas Sosial setelah evaluasi

1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terentaskan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri							2,50%		2,50%							2,07%		1,57%		
		Program Penanganan Bencana								74,42%	1.201.760.100	100,00%	4.274.222.300						88,34%	674.087.800	100,00%	3.466.987.527	
		Program Rehabilitasi Sosial								100,00%	3.919.913.500	100,00%	3.799.530.500						100,00%	2.993.673.500	100,00%	2.735.580.100	
										42,91%	2.963.670.900	77,00%	4.981.051.400						30,49%	2.305.259.300	74,35%	4.089.793.400	
2	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)							100%		100,00%							100,00%		100,00%		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dalam kondisi baik							100,00%	3.300.393.300	100,00%	1.058.463.200						100,00%	3.096.185.100	100%	915.325.800	
										100,00%	62.583.300	100,00%	47.545.100						100,00%	50.053.200	100%	42.006.500	

Rasio Capaian Tahun ke-										Unit Penanggung Jawab
2019		2020		2021		2022		2023		
(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		
K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
0	0,28	102%	#VALUE!	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0	1,21	1,762115	#VALUE!	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0	0,02	0,941512	#VALUE!	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0	0,03	0,761589	#VALUE!	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0,51	0,099502	#VALUE!	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0,00	1	#VALUE!	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

				82,80%		62,80%				
				118,70%	56,09%	100,00%	81,11%			
				100,00%	76,37%	100,00%	72,00%			Bid. Linjamsos
				71,06%	77,78%	96,56%	82,11%			Bid. Rehisos
				1						
				100,00%	93,81%	100,00%	86,48%			Bid. Dayasos
				100,00%	79,98%	100,00%	88,35%			Bid. Dayasos

Rantau, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Sosial Kab. Tapin



Drs. H. SAMSU, MM
NIP. 19640120 199203 1 011

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan
 Atas Nama : Sugiarti, SE
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel.	Persentase laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD yang akurat dan akuntabel	100 %	50%			50%

Rantau, 31 Desember 2022

Kasubbag Keuangan,

Penata Keuangan,

IHYAL ISLAMI, A. Md

SUGIARTI, SE

NIP. 19890604 201101 1 004

NIP. 19890604 201101 1 004

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Atas Nama : Muhammad Al Fajar, SE
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu.	Persentase dokumen Perencanaan dan perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100 %	46,15%	23,08%	15,77%	15%

Rantau, 31 Desember 2022

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,

Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan
Pelaporan,


FENNY MARIATI, SE
NIP. 19840819 201001 2 021


MUHAMMAD AL FAJAR, SE
NIP. 19930827 202012 1 005

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Atas Nama : Viena Aprillia Rahma, S.M
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya dokumen aset yang tercatat dengan baik	Persentase dokumen aset yang tercatat dengan baik	100 %		50%		50%

Rantau, 31 Desember 2022

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


DENY FAKHRIADI, A. Md
NIP. 19800304 201001 1 016

Pranata Barang dan Jasa,


VIENA APRILLIA RAHMA, S.M
NIP. 19950414 202012 2 013

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Atas Nama : Samsuri
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan bersih	100 %	25%	25%	25%	25%

Rantau, 31 Desember 2022

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


DENY FAKHRIADI, A. Md
NIP. 19800304 201001 1 016

Pramu Kebersihan,


SAMSURI
NIP. 19740101 200701 1 036

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL**

Unit Organisasi : Bidang Pemberdayaan Sosial
Atas Nama : Ahmad Yani
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya Ruang Tunggu dan areal makam TMP dalam Kondisi Bersih	Persentase Ruang Tunggu dan areal makam TMP dalam Kondisi Bersih	100 %	25%	25%	25%	25%

Rantau, 31 Desember 2022

JF. Penyuluh Sosial,

Analisis Pelayanan Sosial,



SAHRAN, S.AP
NIP. 19760801 200012 1 003



AHMAD YANI
NIP. 19650715 200701 1 030

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL**

Unit Organisasi : Bidang Rehabilitasi Sosial
Atas Nama : Syahrani
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya dokumen Panti Sosial yang sesuai standar dan tepat waktu	Persentase dokumen Panti Sosial yang sesuai standar dan tepat waktu	100 %	25%	25%	25%	25%

Rantau, 31 Desember 2022

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



CHANDRA DWI SAPUTRA, S. IP, MM
NIP. 19740415 199303 1 002

Analisis Pelayanan Sosial,



SYAHRANI
NIP. 19751109 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS SOSIAL

Jl. Gubernur H. Aberani Sulailman No. 129 Rantau Telp. (0517) 31239
RANTAU, KABUPATEN TAPIN 71111

Nomor : 800/ 181 /Sekt.1/DINSOS/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth.

1. Sekretaris
2. Semua Kepala Bidang
3. Semua Kasubbag dan Kasi Lingkup Dinas Sosial

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang karyawan/karyawati untuk dapat mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : 09.30 Wita s.d. selesai
Tempat : Ruang Kepala Dinas
Acara : Rapat Koordinasi:

1. Monitoring dan Evaluasi Renstra, Rencana Aksi, Realisasi Capaian, dan IKI Triwulan I Tahun 2022,
2. Menentukan Indikator dan Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022,
3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan I Tahun 2022,
4. Hal-hal yang dianggap perlu.

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rantau, 13 April 2022

KEPALA DINAS, *mpe*



Drs. H. SAMSI, MM
NIP. 19640120 199203 1 011

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Jam : 09.30 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Kepala Dinas
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan :

1. Monitoring dan Evaluasi Renstra, Rencana Aksi, Realisasi Capaian dan IKI Triwulan I Tahun 2022
2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan I Tahun 2022
3. Hal-hal yang dianggap perlu lainnya.

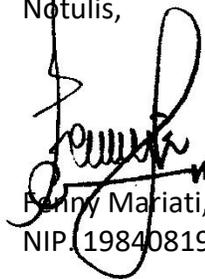
Dalam rapat yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, para Kepala Bidang beserta beberapa Pejabat Struktural dan Staf.

Adapun hal-hal dibahas di dalam rapat tersebut antara lain :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial
2. Bidang-bidang menyampaikan capaian program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada triwulan I.
3. Dllanjutkan dengan paparan capaian kinerja eselon 3, 4, JF dan staff Triwulan I.
4. Capaian SPM Dinas Sosial pada triwulan I dapat dilihat pada aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> yaitu sebesar 61%.

Demikian notulen ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih

Notulis,



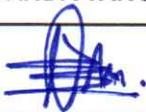
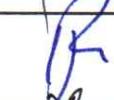
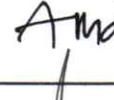
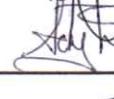
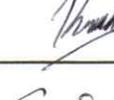
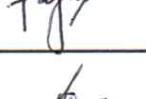
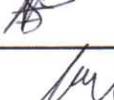
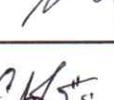
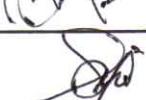
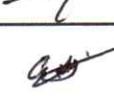
Penny Mariati, SE.

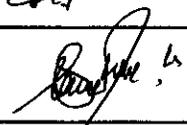
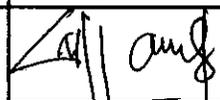
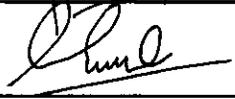
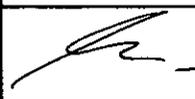
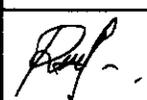
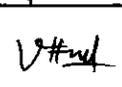
NIP. 19840819 201001 2 021

**DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI INTEREN 2022**

HARI / TANGGAL
TEMPAT

: KAMIS, 14 APRIL 2022
: RUANG KERJA KEPALA DINAS

NO.	NAMA	L/P	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Samsi	L	Kabis	
2	Mila Kesuma -H	P	Sekretaris Dinas	
3	RIMA SARI	P	KABID DAYSOB	
4	Muan Setpanan	L	Kabidlinjansos	
5	Chandra B	L	Kabid Rehos	
6	Kusmadi	L	Pek sos	
7	Tasabiah	P	Pek Sos	
8	Akhmad Hamdani	L	Pekerja Sosid	
9	Fenny M	P	Kasubbag Perencanaan d/ Pelap.	
10	Edy I Hakim	L	Pand. Rehos	
11	SAM SUN	L	ADU. Umum	
12	Rahmat Ridwan .A	L	PTT	
13	Syahrani	L	Staf	
14	M. ALFASAR	L	Staf Perencanaan	
15	Siti Habijah	P	PTT	
16	Bobby Verdana	L	PTT	
17	Felda Sartika	P	PTT	
18	DINA RIRIS YANTI	P	KORDA	
19	M. Zainul Samudri	L	PTT / PINSOS TARUN	
20	ERWIN	L	PTT	

21	Hansak	P	PRT	
22	Susilanti	P	Penas	
23	SAHRAH, S. AP	L	"	
24	A. Yuni	L	PD	
25	IHYAL ISLAMI	L	Kos - keu	
26	Fitria NS	P	PTT	
27	Moerana Rahmi	P	Teraga Kobersmar	
28	Muhammad Rasyid	L	"	
29	Hansak	P	PIT	
30	M. Ripani	P	T-K	
31	Amun R	P	P7T	
32	DINA RIRIS KANTI	P	KOR DA	
33	Mullyana Aftidha	P	PIT	
34	Viena Aprilia Ratna	P	Staf	
35	Sugianti	P	staf	

Mengetahui,
SEKRETARIS



MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd. I, M.M
NIP. 19730317 199503 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS SOSIAL

Jl. Gubernur Aberani Sulaiman No. 129 Telp (0517) 31239 Fax (0517) 32505
RANTAU Kode Pos 71111

Nomor : 800/276/Sekt.1/Dinsos/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 04 Juli 2022

Kepada Yth.
Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV,
Pejabat Fungsional, dan Seluruh Staf
Dinas Sosial Kabupaten Tapin
Di -

Tempat

Bersama ini kami mengundang mengundang Bapak/Ibu agar mengikuti rapat pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 06 Juli 2022
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai
Tempat : Loka Bina Karya (LBK), JL. SPG Rantau
Acara : Monitoring dan Evaluasi Renstra, Rencana Aksi,
Realisasi Capaian dan IKI Triwulan I, II, III dan IV
Tahun 2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Juli 2022
Jam : 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Loka Bina Karya (LBK), JL. SPG Rantau
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan :

1. Monitoring dan Evaluasi Renstra, Rencana Aksi, Realisasi Capaian dan IKI Triwulan II Tahun 2022
2. Penyusunan dan Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tapin
3. Hal-hal yang dianggap perlu lainnya.

Dalam rapat yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, para Kepala Bidang beserta beberapa Pejabat Struktural dan Staf.

Adapun hal-hal dibahas di dalam rapat tersebut antara lain :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial
2. Bidang-bidang menyampaikan capaian program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada triwulan II.
3. Dllanjutkan dengan paparan capaian kinerja eselon 3, 4, JF dan staff Triwulan II.
4. Penyusunan dan evaluasi tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Sosial
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memaparkan draft uraian tugas.
6. Selanjutnya pemaparan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial draft uraian tugas.
7. Kemudian Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyampaikan draft uraian tugas.
8. Penjelasan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial.

Demikian notulen ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih

Notulis,



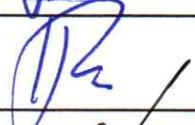
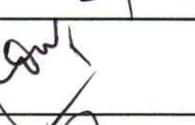
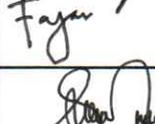
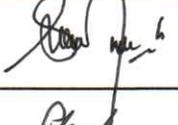
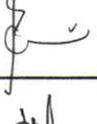
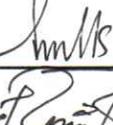
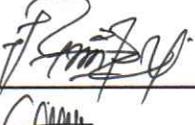
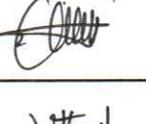
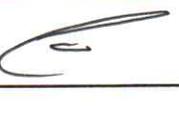
Henny Mariati, SE.

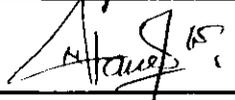
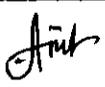
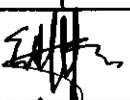
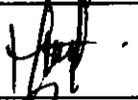
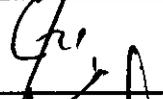
NIP. 19840819 201001 2 021

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI URAIAN TUGAS 2022

HARI / TANGGAL
TEMPAT

: RABU, 06 JULI 2022
: AULA LBK, JL. SPG RANTAU

NO.	NAMA	L/P	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	H. SAMSI	L	KADIS	
2	RINA SARI	P	KABID DAYSOS	
3	Chandra N	L	Kabid Resos	
4	Wan Setpawan	L	Kabid Lijawasa	
5	Akhmad Hamdani	L	Peksos	
6	M. Abid Wardhana	L	JF. Peksos	
7	Deny Faldhriadi	L	Kasubag Umpeg	
8	Kusmadi	L	Peksos Ahli Muda	
9	Syahrani	L	Staf	
10	M. ALFAJAR	L	Stat. perenc. & pelap.	
11	Sukilamati	P		
12	SAHRAN	L	Pensos	
13	Fenny M	P	Kasub. Perenc & Pelap	
14	IHYAL ISLAMI	L	KASUBAG. KEUANGAN	
15	Permana Hendra S.	L	PIT Dinsos	
16	Muljana Africha	P	PTT Dinsos	
17	Pistya Murgannah	P	Pendamping Peksos	
18	Viera Aprillia Rahma	P	staf umum & kepegawain	
19	Hafsah	P	PTT	
20	Samsuri	L	Adm. Umum	

21	Felda Sartika	P	PTT	
22	SITI HADISAH	P	PTT	
23	Bobby Rudianto	L	PTT	
24	M. Zainal Samhudi	L	PTT / P. Insas	
25	Felicia. n. s	L	"	
26	M. Rasyid	L	PTT	
27	Rahmad Ridwan Arief	L	PTT	
28	Amrina Rohama	P	PTT	
29	Suglari	P	P. Kau	
30	Ahmad Yuni	L	OTAT	
31	Tulida Harini	P	Kortab. PKH	
32	Ana Nurul H	P	Pdp.	
33	Wahidah	P	Pdp	
34	Erwin P	L	PTT	
35	Edy Ulwin Hakim	L	S. Pokros	
36	Harudin	L	P. D	
37	Josabrah	P	Pokros Ahs. neder	
38	Kamatudin	L	Keamanan Lbk	
39	M. Zainal Samhudi	L	PTT	
40	Nor Ana Rahmi	P	P. Kebersihan	

Rantau, 06 Juli 2022
An. Kepala Dinas,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian


DENY FAKHRIADI, A. Md
NIP. 19800304 201001 1 016





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS SOSIAL

Jl. Gubernur Aberani Sulaiman No. 129 Telp (0517) 31239 Fax (0517) 32505
RANTAU Kode Pos 71111

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 04 Oktober 2022

Kepada Yth.
Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV,
Pejabat Fungsional, dan Seluruh Staf
Dinas Sosial Kabupaten Tapin
Di -

Tempat

Bersama ini kami mengundang mengundang Bapak/Ibu agar mengikuti rapat pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 04 Oktober 2022
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai
Tempat : Ruang Kepala Dinas
Acara : Monitoring dan Evaluasi Renstra, Rencana Aksi,
Realisasi Capaian dan IKI Triwulan III Tahun 2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Oktober 2022
Jam : 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Kepala Dinas Sosial
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan :

1. Monitoring dan Evaluasi Renstra, Rencana Aksi, Realisasi Capaian dan IKI sampai dengan Triwulan III Tahun 2022
2. Hal-hal yang dianggap perlu lainnya.

Dalam rapat yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, para Kepala Bidang beserta beberapa Pejabat Struktural dan Staf.

Adapun hal-hal dibahas di dalam rapat tersebut antara lain :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial
2. Bidang-bidang menyampaikan capaian program/kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan triwulan III, serta faktor hambatan dan faktor pendukung pencapaian kinerja.
3. Dllanjutkan dengan paparan capaian kinerja eselon 3, 4, JF dan staff sampai dengan Triwulan III.

Demikian notulen ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih

Notulis,

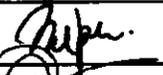
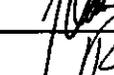
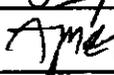
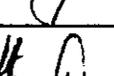
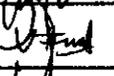
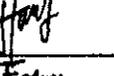
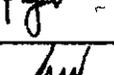
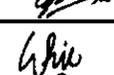
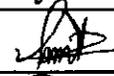
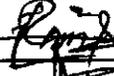
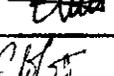
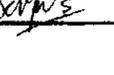
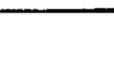


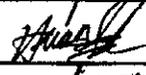
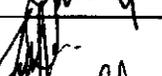
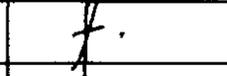
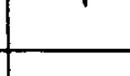
Penny Mariati, SE.

NIP. 19840819 201001 2 021

**DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI INTEREN 2022**

HARI / TANGGAL :
TEMPAT :

NO.	NAMA	L/P	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Samsi	L	Kadis	
2	Mila Kesuma Handayani	P	Sekretaris Dinas Sosial	
3	Chandra AS	L	Labid Rehos	
4	Kusmadi	L	Peke sos	
5	Wahy Setyaningrum	L	Kebidang anwari	
6	RINA SARI	P	KASID DAY SOS	
7	SAHRAN	L	Pensos	
8	AKHMAD Hamdani	L	Pekerja Sosial	
9	Fenny M	P	Koab. Perenc + Pelap	
10	Jasabillah	P	Pekeos	
11	Syahrani	L	Staf	
12	Samsun	L	Adm Umum	
13	HYAL ISLAMU	L	F. Koa	
14	A. Yuni	L	Staf	
15	Viera Aprilla Rahma	P	Staf umum kepegawain	
16	Khairusdi	L	Pend. Rehos.	
17	M. AL FAJAR	L	Staf. Perenc. & Pelap.	
18	Bobby Permana	L	PTT	
19	Rahmat Ridwan A	L	PTT	
20	Erwin P	L	PTT	
21	Permana Hendra S	L	PTT	
22	Mulyana Afridha	P	PTT	
23	Eky Lukman Hakim	L	Pend. Rehos	
24	Ristyana Muzannah	P	Pend. Rehos	
25	Felda Sartika	P	PTT	

26	M. Zeinal Samhedi	L	PTS / Dinsos Tapin	
27	Harish	P	PTT	
28	Siti Hadijah	P	PTT Dinsos Tapin	
29	M. Rasyid	L	PTT	
30	Amuna Rokama	P	PTT	
31	Yusuda Hariani	P	Korkeab PKH	
32	Zaid	L	POP	
33	Zulpa	P	POP	
34	KAMARUDIN	L	Penjaga LBR	
35	DINA RIRIS VANTI	P	KOROK	
36	Samsari	L	staf	
37	M. Abid Wardham	P	Pejabat	
38	Sudawati	P	Penjajah Satran	
39	Sugiarti	P	staf	
40	Futris Ns	P	PTT	
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Mengetahui,
SEKRETARIS



MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd. I, M.M
NIP. 19730317 199503 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS SOSIAL

Jl. Gubernur Aberani Sulaiman No. 129 Telp (0517) 31239 Fax (0517) 32505
RANTAU Kode Pos 71111

Nomor : 460/622.a/Sekt.1/Dinsos/2022

Rantau, 14 Desember 2022

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth.

Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV,
Pejabat Fungsional, dan Seluruh Staf
Dinas Sosial Kabupaten Tapin

Di -

Tempat

Bersama ini kami mengundang mengundang Bapak/Ibu agar mengikuti rapat pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 15 Desember 2022

Waktu : 14.00 Wita s.d selesai

Tempat : Loka Bina Karya (LBK), JL. SPG Rantau

Acara : Monitoring dan Evaluasi Renstra, Rencana Aksi,
Realisasi Capaian dan IKI Triwulan I, II, III dan IV
Tahun 2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

Jam : 09.00 Wita s/d Selesai

Tempat : Loka Bina Karya (LBK), JL. SPG Rantau

Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan :

1. Monitoring dan Evaluasi Renstra, Rencana Aksi, Realisasi Capaian dan IKI sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
2. Hal-hal yang dianggap perlu lainnya.

Dalam rapat yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, para Kepala Bidang beserta beberapa Pejabat Struktural dan Staf.

Adapun hal-hal dibahas di dalam rapat tersebut antara lain :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial
2. Bidang-bidang menyampaikan capaian program/kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan triwulan IV, serta faktor hambatan dan faktor pendukung pencapaian kinerja.
3. Dllanjutkan dengan paparan capaian kinerja eselon 3, 4, JF dan staff sampai dengan Triwulan IV.

Demikian notulen ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih

Notulis,



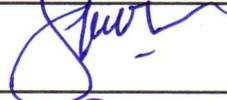
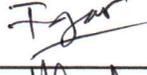
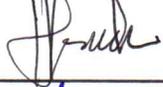
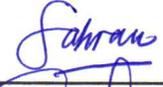
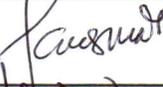
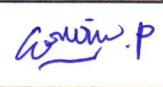
Penny Mariati, SE.

NIP. 19840819 201001 2 021

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL
TEMPAT

: KAMIS / 15 DESEMBER 2022
: LOKA BINA KARYA (LBK), JL. SPG Rantau

NO.	NAMA	L/P	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	H. Samud	L	Kadis Sosial	
2	Hj. Mila Kesuma. H.	P	Stekretaris	
3	Deny . F	L	Kasubag Uupry	
4	RINA SARI	P	Kabid Datasos	
5	Chandra D	L	Kabid Rahsos	
6	Fenny . M	P	Kasubag Perenc & Pelap	
7	M. AL-FAJAR	L	staf -	
8	Imaniah	P	Kabid Gijinasos	
9	Myai Isomi	L	K-KOU	
10	SAHRAN	L	Pekasos	
11	Suslawaati	P	-	
12	Akhmad Hamdani	L	Pekasos	
13	Kusmadi	L	-	
14	M. Abid Wardhana	L	-	
15	Stahriani	L	staf	
16	Viera Aprillia Ratima	P	staf	
17	Sugianti	P	-	
18	Samsuri	L	-	
19	Stwin . P	L	PTT	
20	Amna P	P	-	



21	Fitria Novita S.	P	PTT	<i>Fis</i>
22	Mulyana Afrida	P	-/-	<i>Mulyana A</i>
23	Bobby Perdana	L	-/-	<i>Bobby</i>
24	Siti Harizah	P	-/-	<i>Siti Harizah</i>
25	Hajjiya Haya. B.	P	-/-	<i>HJB</i>
26	Harisah	P	-/-	<i>Harisah</i>
27	Khamudin	L	Pend. Pehsos	<i>K</i>
28	EdyDuleman Hakim	L	-/-	<i>EdyD</i>
29	Hendra .P	L	-/-	<i>Hendra P</i>
30	Feloa Sartika	P	PTT	<i>Feloa S</i>
31	RAHMAT .R.A.	L	-/-	<i>Rahmat</i>
32	Rista. N.	P	Pend. PELUT	<i>Rista N</i>
33	- Nur Anna Pahmi	P.	p. Keselamatan	<i>Nur Anna Pahmi</i>
34	M. Rizkani	L	p. Keamanan	<i>M Rizkani</i>
35	Dina Riris Janti	P	Pend. BPAT	<i>Dina Riris Janti</i>
36	RIDA AGUSTINA	P	PSM	<i>Rida Agustina</i>
37	Rusli	L	TEBU	<i>Rusli</i>
38	Mano Harjani	P	TABANA	<i>Mano Harjani</i>
39	Abbi	L	Pasulubur	<i>Abbi</i>
40	A. Zulfah.	P	APB	<i>Zulfah</i>

Mengetahui,

SEKRETARIS



MILA KESUMA HINDARTI, S.Pd. I, M.M

NIP. 19730317 199503 2 002

